

# LAKIP

**DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**

**2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**

Jalan H. Boejasin No. 32 Telp / Fax. 0512 – 2021374 Pelaihari 70814 Email : [Dinsostala@gmail.com](mailto:Dinsostala@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan pertanggungjawaban institusi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 ini disampaikan dengan harapan adanya saran maupun tanggapan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini, dan akan kami pertimbangkan untuk penyempurnaannya.

Pelaihari,        Januari 2020  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Tanah Laut

**Ir. Nor Hidayat**  
NIP. 19630824 199403 1 007

## KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok .....	2
C. Struktur Organisasi .....	4
D. Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut .....	5
E. Sistematika Penyajian .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
A. Rencana Strategis .....	8
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 .....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi .....	23
1. Sasaran RPJMD .....	24
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	24
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Tahun 2020 .....	37
A. Capaian Sasaran .....	37
B. Capaian Kinerja Kegiatan .....	46
4. Realisasi Anggaran .....	59
BAB IV PENUTUP .....	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Bangsa Indonesia pada saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis dan dinamis yang mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugastugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigm pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi seimbang antara Pemerintah, Swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip dasar antara lain adanya transparasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari good governance dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait hal ini akan memudahkan Institusi Pemerintah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah didalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, penerapan di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut salah satunya didukung oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) Dinas Sosial Tahun 2020

Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LAKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang pada pelaksanaannya telah dilengkapi dengan penandatanganan perjanjian kinerja dari eselon II hingga Staf, pengukuran kinerja triwulan yang juga telah diinput di aplikasi E-SAKIP serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dari eselon II hingga Eselon IV.

## **B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan dinas teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi :

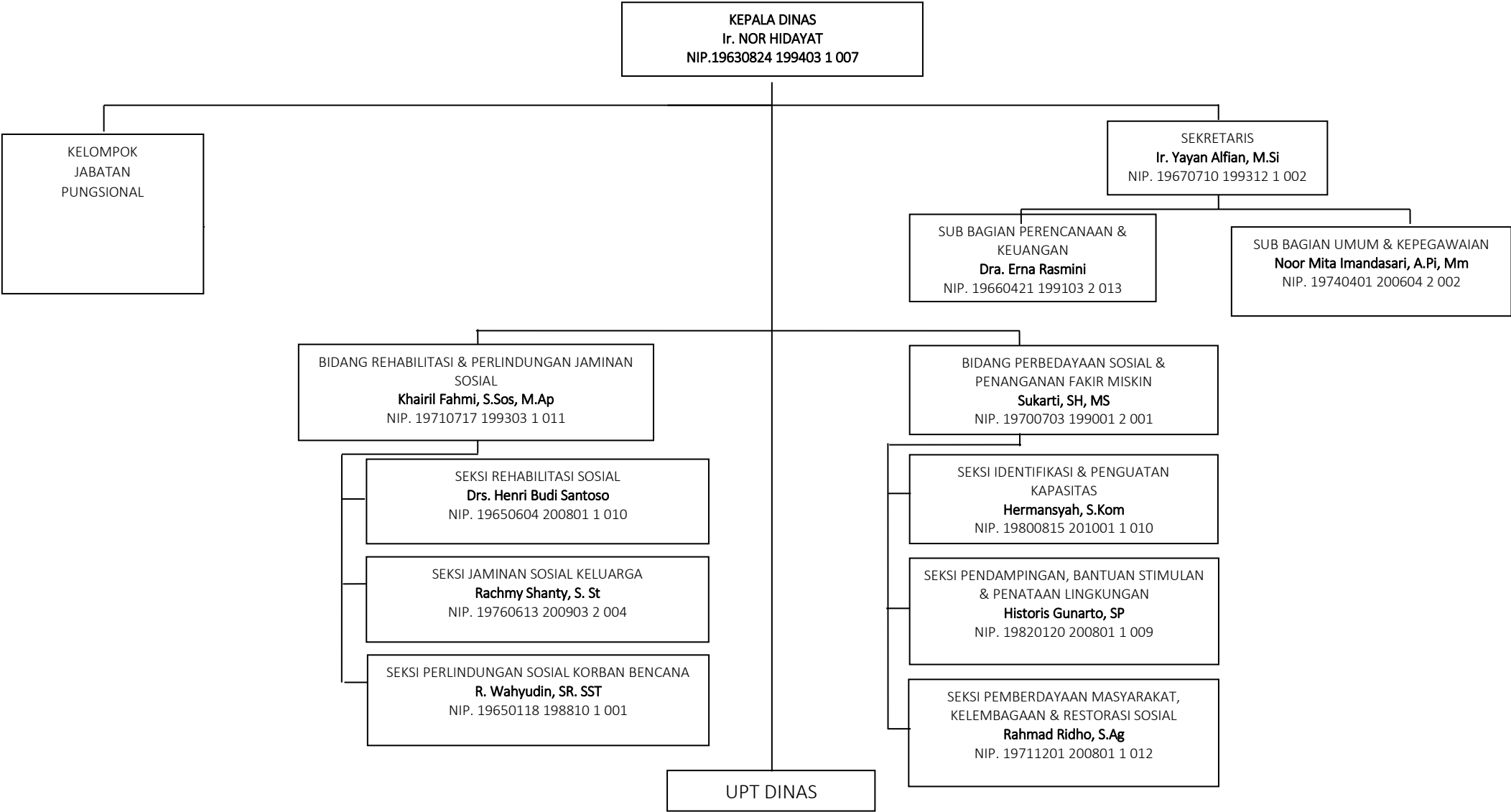
- 1) perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) pembinaan UPT Dinas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten  
Tanah Laut**

NO	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Kadis	Sekretariat	Bid. Pemb Sos & Pengn FakMis	Bid. Rehab & PrInd JamSos
1	P N S	27				
	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1	-	-	-
-	Pembina Tk.I	-		1	-	-
	Pembina	-		-	-	-
	Penata Tingkat I	III/d		2	1	1
	Penata	III/c		-	2	2
	Penata Muda Tk.I	III/b		1	-	-
	Penata Muda	III/a		1	2	-
	Pengatur Tk.I	II/d		-	-	-
	Pengatur	II/c		3	1	2
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b		1	-	-
	Pengatur Muda	II/a		-	1	-
	Juru Tingkat I	I/d		2	-	-
	Juru	I/c		-	-	-
	Juru Muda Tk I	I/b		-	-	-
	Juru Muda	I/a		-	-	-
2	Honorar Daerah	-	-	-	-	-
3	PTT/Sukwan/Kontrak	PTT	-	10	3	3

C. STRUKTUR ORGANISASI



### **Penjelasan Bagan :**

Struktur Organisasi SKPD ditunjuk untuk menunjukkan Organisasi, jumlah personil dan Tata laksana Dinas Sosial untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan Dinas Sosial dibantu oleh satu Sekretariat dan dua Bidang yang terdiri dari :

1. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial
  - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
  - c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
3. Bidang Pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin
  - a. Seksi Identifikasi dan penguatan kapasitas
  - b. Seksi perlindungan bantuan stimulant dan penataan lingkungan
  - c. Seksi Pemberdayaan masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi sosial.

### **D. Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut**

Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial masih dibayangi oleh kecendrungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas dan berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta dapat menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu Strategis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan pada RPJMD tahun 2018-2023 dan evaluasi capaian pembangunan kesejahteraan sosial yang patut mendapat perhatian antara lain :

1. Jangkauan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau mereka yang tinggal di daerah pedesaan secara merata.



2. Usaha pembangunan kesejahteraan sosial belum mampu mencapai seluruh aspek Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS).
3. Keterbatasan dana dan peralatan penanggulangan bencana.
4. Terbatasnya pekerja sosial yang professional yang mampu dalam melaksanakan tugas penanganan masalah kesejahteraan sosial.
5. Pelayanan terhadap penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi ketunaan, kerawanan, keterlantaran dan kemiskinan belum optimal.
6. Kelembagaan sosial belum tersedia dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
7. Organisasi sosial dan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum berperan dengan baik/ optimal.
8. Masih terbatasnya akses penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar.
9. Masih rendahnya pilar partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran/ pemahaman masyarakat dalam gerakan kesetiakawanan sosial.
10. Belum optimalnya implementasi berbagai kebijakan dan peraturan daerah terkait dengan penanganan PMKS, lemahnya pengawasan dan pendampingan terhadap PMKS yang berada di desa-desa.
11. Keberadaan PMKS di Kabupaten Tanah Laut juga tidak terlepas dari kurang optimalnya penanganan serta kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PMKS sehingga tidak jarang terdapat PMKS yang menolak untuk kembali ke keluarga atau diterlantarkan oleh keluarganya sendiri.

#### **E. Sistematika Penyajian**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I           Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani.

- Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2020, dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.
- Bab III Adalah Akuntabilitas Kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan, dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2020.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan program dan kegiatan yang realistis. Adapun visi dan misi Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 yaitu ***“Terwujudnya Tanah Laut yang “Berinteraksi” yaitu Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi”*** .

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut dengan memperhatikan kondisi dan persoalan yang ada, tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan 5 (lima) misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pembangunan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religius dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut terkait dengan misi ke-5 yaitu : ***Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat***. Tujuan akhir Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS
3. Meningkatkan Perlindungan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana

Didasarkan kepada analisa kondisi umum lingkungan dan ruang Kabupaten Tanah Laut serta hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan periode sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, kekuatan, peluang, tantangan, dan ancaman dalam pelayanan bidang sosial ke depan.

Kebijakan pelayanan bidang sosial juga tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanah Laut. **Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :**

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi Mandiri
2. Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan (%)
3. Persentase PMKS yang tertangani
4. Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya.

Selain mengacu pada RPJMD, pembangunan kesejahteraan sosial juga harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota.

**Jenis pelayanan dasar pada SPM** bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial
4. Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial
5. Perlindungan dan Jaminanan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/ Kota.

### Tujuan 1

Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM
Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</li> <li>2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</li> <li>3. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo</li> <li>4. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</li> </ol>
PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan

	Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
PMKS yang menjadi Mandiri	Program Pembinaan, Pengembangan, Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial

### Tujuan 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM
Lanjut Usia Terlantar yang menerima bantuan sosial	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
Penyandang Disabilitas Terlantar yang menerima bantuan sosial	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Anak Terlantar yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

### Tujuan 3

Meningkatkan Perlindungan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM
Warga terdampak bencana yang menerima bantuan sosial	Program Pembinaan, Pengembangan, Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial

Dari masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis, sasaran strategis Dinas Sosial diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas Sosial, sasaran strategis tersebut adalah :

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>
1.	Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan	Persentase Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan yang tersedia
		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani
		PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial
		PMKS yang menjadi Mandiri	Persentase PMKS yang mandiri
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Lanjut Usia Terlantar yang menerima bantuan sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
		Penyandang Disabilitas Terlantar yang menerima bantuan sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
		Anak Terlantar yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Persentase anak terlantar yang meningkat kemampuannya
3	Meningkatkan Perlindungan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana	Warga terdampak bencana yang menerima bantuan sosial	Persentase warga terdampak bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

## B. Perjanjian Kinerja (PK) 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja pada Tahun 2020</b>
1.	Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan	Persentase Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan yang tersedia	75%
2.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	100%
3.	PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial	50%
4.	PMKS yang menjadi Mandiri	Persentase PMKS yang mandiri	15%
5.	Lanjut Usia Terlantar yang menerima bantuan sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
6.	Penyandang Disabilitas Terlantar yang menerima bantuan sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
7.	Anak Terlantar yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Persentase anak terlantar yang meningkat kemampuannya	100%

8.	Warga terdampak bencana yang menerima bantuan sosial	Persentase warga terdampak bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	75%
----	--	--	-----

Perjanjian Kinerja tersebut dapat diwujudkan dengan dukungan Program sebagai berikut :

**Program Pendukung Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2020	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan	Persentase Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan yang tersedia	75%	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>  Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Rp. 512.049.500
	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	100%	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>  Pembinaan korban tindak	Rp. 86.230.000



	PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial	50%	<b>Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b> 1. Penunjang program rutilahu dan sarling 2. Pembinaan pendampingan, bantuan stimulant dan penataan lingkungan	Rp. 126.871.000  Rp. 725.075.000
	PMKS yang menjadi Mandiri	Persentase PMKS yang mandiri	15%	<b>Program Pembinaan, Pengembangan, Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial</b> Penunjang program keluarga harapan	Rp. 315.274.000
	Lanjut Usia Terlantar yang	Persentase Lanjut Usia	100%	<b>Program pembinaan panti</b>	

	menerima bantuan sosial	Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		<b>asuhan /panti jompo</b> Pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar	Rp. 832.200.000
	Penyandang Disabilitas Terlantar yang menerima bantuan sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b> Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat	Rp. 198.045.000
	Anak Terlantar yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Persentase anak terlantar yang meningkat kemampuannya	100%	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b> 1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Rp. 67.070.000
	Warga terdampak bencana yang menerima bantuan sosial	Persentase warga terdampak bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	75%	<b>Program Pembinaan, Pengembangan, Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan</b>	

				<b>Jaminan Sosial</b> Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	Rp. 298.233.000
--	--	--	--	---	-----------------

## **BAB 3**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut selaku pengemban tugas amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sesuai aturan yang berlaku. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja Dinas Sosial. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi instansi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Untuk mempermudah interpretasi hasil pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan Skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang juga dipakai dalam penyusunan LAKIP adalah :

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤	Sangat Baik	
2.	76 – 90	Tinggi	
3.	66 – 75	Sedang	
4.	51 – 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat rendah	

(Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010)

#### A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

##### 1. Sasaran RPJMD

Kebijakan pelayanan bidang sosial juga tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanah Laut. Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi Mandiri
2. Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan (%)
3. Persentase PMKS yang tertangani
4. Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya.

### 3.2 CAPAIAN KINERJA

#### 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang akan digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2018 - 2023.



Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut disusun dengan mengacu kepada IKU pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut**  
**Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan	Persentase Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan yang diverifikasi dan divalidasi	75 %	23,5 %		Tidak mencapai target
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat pelayanan sosiali	100 %	36,4 %		Tidak mencapai target
PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial	50 %	50 %		Mencapai target
PMKS yang menjadi Mandiri	Persentase PMKS yang mandiri	15 %	6,98 %		Tidak mencapai target

Lanjut Usia Terlantar yang menerima bantuan sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %		Mencapai target
Penyandang Disabilitas Terlantar yang menerima bantuan sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %		Mencapai target
Anak Terlantar yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Persentase anak terlantar yang meningkat kemampuannya	100 %	100 %		Mencapai target
Warga terdampak bencana yang menerima bantuan sosial	Persentase warga terdampak bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	75 %	100 %		Melebihi target

Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2020, terdapat 5 (lima) indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Sedangkan ada 3 (tiga) indikator kinerja utama yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Adanya beberapa target sasaran yang tidak memenuhi target tentunya terkait dengan meningkatnya angka PMKS di Kabupaten Tanah Laut.

Meningkatnya angka PMKS pada tahun 2020 sangat dipengaruhi dengan adanya Pandemi Covid-19.

Berikut perhitungan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 :

$$\frac{\text{Jumlah PMKS tahun (n-1)} - \text{Jumlah PMKS Tahun (n)}}{\text{Jumlah PMKS tahun (n)}} \times 100\% =$$
$$\frac{\text{Jumlah PMKS tahun 2019} - \text{Jumlah PMKS tahun 2020}}{\text{Jumlah PMKS tahun 2020}} \times 100\% =$$
$$\frac{31.847 - 45.090}{45.090} \times 100\% = -29,37 \%$$

Angka PMKS Tahun 2020 cenderung meningkat dari angka 31.847 jiwa menjadi 45.090 jiwa atau naik sekitar 33,37%. Meningkatnya angka PMKS di Kabupaten Tanah Laut dipengaruhi adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2020.

Dengan adanya pandemi covid-19, mengakibatkan roda perekonomian masyarakat menjadi terhambat, daya beli menurun, aktifitas masyarakat pun tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain adanya covid-19, meningkatnya angka PMKS pun dipengaruhi oleh tidak berjalannya Program-program pemberdayaan masyarakat sehingga angka kemiskinan semakin meningkat, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan semakin tinggi.

Dengan demikian maka target menurunkan angka PMKS sebesar 10% di Tahun 2020 menjadi tidak tercapai.

Pencapaian IKU Dinas Sosial tahun 2020 sangat di dukung oleh program Perlindungan Sosial dan Program Fakir Miskin, baik yang menggunakan dana APBD maupun APBN.

Berikut uraian program kegiatan berdasarkan sumber dana :

No.	Uraian Kegiatan	Sasaran	Jumlah	Sumber dana	
				APBD	APBN
1	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Keluarga Fakir Miskin	620 KPM		APBN
2	Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga Fakir Miskin	6.769 KPM		APBN
3	Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Tearlantar	Lanjut Usia Terlantar	594Orang	APBD	
4	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	542 orang	APBD	
5	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	47 orang	APBD	
6	Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Fakir Miskin	Fakir Miskin	548 orang	APBD	
	Praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Anak terlantar	20 orang	APBD	
8	Pemulangan Eks Warga Binaan Lembaga Permayarakatan	Eks Narapidana	70 orang	APBD	

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Data PMKS Keseluruhan**  
**Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

NO.	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	KAB. TALA
1	Anak Balita Terlantar	
2	Anak Terlantar	24
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	36
4	Anak Jalanan	-
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	-
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-
8	Lanjut Usia Terlantar	12.646
9	Penyandang Disabilitas	3044
10	Tuna Susila	-
11	Gelandangan	-
12	Pengemis	-
13	Pemulung	-
14	Kelompok Minoritas	-
15	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	124
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-

18	Korban Traffiking	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-
21	Korban Bencana Alam	67
22	Korban Bencana Sosial	25
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-
24	Fakir Miskin (FM)	29.124
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-
	<b>TOTAL</b>	<b>45.090</b>

Di Kabupaten Tanah Laut tidak semua jenis PMKS tersebut dapat terlayani, hanya 10 jenis PMKS yang dapat terlayani oleh Program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Berikut jumlah PMKS yang dapat ditangani melalui Program/Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2020 :

**Tabel 3.3**  
**Jumlah PMKS yang dapat ditangani Dinas Sosial**  
**Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Jenis PMKS</b>	<b>Jumlah</b>
1	Anak Balita Terlantar	<b>0</b>
2	Anak Terlantar	<b>24</b>
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	<b>36</b>

4	Lanjut Usia Terlantar	<b>594</b>
5	Penyandang Disabilitas	<b>542</b>
6	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemsayarakat (BWLP)	<b>124</b>
7	Korban Penyalahgunaan NAPZA	<b>0</b>
8	Korban Bencana Alam	<b>67</b>
9	Korban Bencana Sosial	<b>25</b>
10	Fakir Miskin	<b>15.002</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.414</b>

Berikut Kriteria 10 (sepuluh) PMKS yang dapat terlayani oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 berdasarkan Permensos No. 08 Tahun 2012 :

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Kriteria:
  - a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
  - b. berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
  - c. kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
  - d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
  - e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan;
  - f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan

ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

- a. berasal dari keluarga fakir miskin;
  - b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
  - c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a. disangka;
  - b. didakwa; atau
  - c. dijatuhi pidana
4. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
  - b. terlantar secara psikis, dan sosial.
5. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;



- d. penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
  - e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
  - f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
6. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- Kriteria :
- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
  - b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
  - c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
  - d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
  - e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
- Kriteria :
- a. seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
  - b. secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
  - c. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.
8. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria : Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. korban terluka atau meninggal;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. dampak psikologis; dan
  - d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria : Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. korban jiwa manusia;
  - b. kerugian harta benda; dan
  - c. dampak psikologis.
10. Fakir Miskin (FM) adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kriteria :
- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
  - b. mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

#### **a. Capaian Sasaran Strategi**

##### **1. Sasaran strategi sesuai Renstra dan Target**

Pengukuran kinerja merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk itu capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2018 - 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2020, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Persentase Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	-29,37	10	-293,70

Berdasarkan Tabel 3.4 Pencapaian indikator Persentase menurunnya angka PMKS tidakterrealisasi sebesar **-293,70 %** dari target **10%** sehingga capaian Persentase menurunnya angka PMKS tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di Kabupaten tanah Laut tidak hanya menggunakan dana APBD II, tetapi juga menggunakan dana dari APBD I Provinsi Kalimantan Selatan dan dana APBN dari Kementerian Sosial.

Untuk mengukur Indikator Kinerja (IKU) Kabupaten yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dapat diuraikan sebagai berikut :

% PMKS yang menjadi mandiri =

$\frac{\text{PMKS Mandiri}}{\text{PMKS yang ditangani}} \times 100 \%$
--

$\frac{1147}{16414} \times 100 \%$
<b>= 6,98%</b>

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 yang mengacu pada IKU Kabupaten masih belum mencapai target yang ditetapkan target IKU Kabupaten sebesar 15 % baru tercapai 6,98 %, hal ini disebabkan oleh

- a. Keterbatasan anggaran dan SDM Kesejahteraan Sosial yang masih sangat terbatas.
- b. Data PMKS yang masih belum valid sehingga data yang disampaikan masih sering berubah.
- c. Adanya Pandemi Covid19 yang berdampak pada meningkatnya angka PMKS.

### 3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

#### A. Capaian Kinerja Sasaran

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Esselon II</b>					
1.	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Menurunnya angka PMKS	10%	-29,37 %	
<p><b>Analisis :</b> Pencapaian indikator Persentase menurunnya angka PMKS tidakterrealisasi sebesar <b>-293,70 %</b> dari target <b>10%</b> sehingga capaian Persentase menurunnya angka PMKS tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di Kabupaten tanah Laut tidak hanya menggunakan dana APBD II, tetapi juga menggunakan dana dari APBD I Provinsi Kalimantan Selatan dan dana APBN dari Kementerian Sosial.</p>					
<b>Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</b>					
2.	Meningkatnya kemampuan Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Fakir miskin yang mampu terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan berfungsi sosial	50 %	100%	
3.	Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam	75 %	100%	

		penyelenggaraan Kesejahteraan sosial			
4.	Meningkatnya peran dunia usaha melalui forum CSR dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah penyandang kesejahteraan sosial yang mandiri setelah ditangani forum CSR dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	25 %	0%	
5.	Meningkatnya kualitas informasi data PMKS dan Basis Data Terpadu (BDT)	Tingkat akurasi data PMKS dan Basis Data Terpadu (BDT) di Kab. Tanah Laut	75 %		
<p><b>Analisis :</b></p> <p>Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Fakir Miskin yang terpenuhi kebutuhannya telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 50 %, sedangkan realisasi mencapai 100%, hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa bantuan sosial pada masa pandemic covid19, namun demikian terpenuhinya kebutuhan dasar yang dimaksud disini adalah kebutuhan pangan saja.</p> <p>Demikian juga dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam penyelenggaraan Kessos telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 75 %, realisasinya mencapai 100% artinya seluruh PSKS telah terampil dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.</p>					
<b>Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Jaminan Sosial</b>					
6.	Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial	15 %	6,98%	
7.	Meningkatnya Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program	25 %	10,90%	

	Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga Harapan (PKH) yang graduasi mandiri			
<b>8.</b>	Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa	Persentase Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat dan keberfungsian sosial	<b>75 %</b>		
<p><b>Analisis :</b></p> <p>Dari uraian diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 yang mengacu pada IKU Kabupaten masih belum mencapai target yang ditetapkan target IKU Kabupaten sebesar 15 % baru tercapai 6,98 %, hal ini disebabkan oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan anggaran dan SDM Kesejahteraan Sosial yang masih sangat terbatas.</li> <li>Data PMKS yang masih belum valid sehingga data yang disampaikan masih sering berubah.</li> <li>Adanya Pandemi Covid19 yang berdampak pada meningkatnya angka PMKS.</li> </ol>					
<b>Sekretaris</b>					
<b>9.</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	<b>A</b>	<b>BB</b>	
<b>10.</b>	Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Sosial	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

11.	Peningkatan Kualitas SDM Dinas Sosial	Jumlah Aset yang tercatat	100%	100%	
12.		Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS Dinas Sosial	100%	100%	
		Persentase peserta Pelatihan/Bimtek yang memiliki sertifikat	100%	100%	
<b>Analisis :</b> Pada kegiatan di sekretariat nilai saki yang ditargetkan adalah A. Namun, belum dapat terealisasi karena nilai saki yang diperoleh baru mencapai nilai B. Sedangkan, pada yang lain telah mencapai target.					
<b>Seksi Pendampingan Bantuan Stimulant dan Pentaan Lingkungan</b>					
13.	Memberikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin	Jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	584	584	100%
14.	Memfasilitasi bantuan sosial rumah tidak layak huni	Jumlah rumah Keluarga Fakir Miskin yang direhab	100	100	100%
15.	Memfasilitasi bantuan stimulan dan pendampingan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) KUBE bagi keluarga fakir miskin Pedesaan, Perkotaan dan daerah pesisir	Jumlah keluarga fakir miskin yang mandiri setelah diberikan bantuan stimulan UEP KUBE			
16.	Melaksanakan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga fakir miskin yang melaksanakan usaha mandiri			



		setelah mengikuti pelatihan			
<b>Analisis :</b>					
<b>Seksi Pemberdayaan, Kelembagaan dan Restorasi Sosial</b>					
<b>17.</b>	Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSM Yang Terampil	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>
		Jumlah TKSK yang Terampil	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>
		Jumlah Pendamping Sosial yang terampil	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>
		Jumlah Pengurus orsos dan Karang Tauna yang terampil	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>100%</b>
<b>18.</b>	Fasilitasi penanaman pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah peserta saresehan tentang pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>19.</b>	Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Forum CSR	Jumlah dunia usaha yang tergabung dalam Forum CSR yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Analisis :</b>					
<b>Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas</b>					
<b>20.</b>	Melaksanakan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT)	Jumlah data fakir miskin dan data orang tidak mampu yang	<b>30.000</b>	<b>19124</b>	

		diverifikasi dan divalidasi			
<b>21.</b>	Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bagi petugas pendata dan operator data tingkat desa dan kecamatan	jumlah operator data di desa dan di kecamatan yang terlatih dalam mengelola sistem informasi data	<b>135</b>	<b>135</b>	
<b>22.</b>	Melaksanakan pendataan PMKS	Jumlah PMKS yang di data dan di validasi	<b>10000</b>	<b>16.414</b>	
<b>23.</b>	Melaksanakan updating data secara berkala	jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan updating data	<b>135</b>	<b>135</b>	
<b>24.</b>	Melaksanakan evaluasi pemanfaatan data	Jumlah pemanfatan BDT oleh Instansi terkait	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>Analisis :</b> Basis data terpadu PMKS dan kemiskinan merupakan sasaran strategis yang harus dicapai, namun pada tahun 2020 Dinas Sosial belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 75 % ketersediaan Basis Data Terpadu yang terverifikasi dan tervalidasi. Dinas Sosial hanya mampu mencapai 63,75%.					
<b>Seksi Rehabilitasi Sosial</b>					
<b>25.</b>	Memberikan/memfasilitasi pelatihan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.	Jumlah anak terlantar yang mendapat pendidikan dan pelatihan	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>
<b>26.</b>	Memberikan/memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks trauma	Jumlah Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

		pendidikan dan pelatihan kerja			
<b>27.</b>	Mendistribusikan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>100%</b>
<b>28.</b>	Mendistribusikan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>100%</b>
<b>29.</b>	Melaksanakan Pendampingan bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Balita terlantar	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Anak Balita Terlantar yang terlindungi haknya setelah mendapat pendampingan sosial	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>
<b>30.</b>	Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Eks Penyandang penyakit sosial	Jumlah Penyandang penyakit sosial yang terampil setelah mengikuti pelatihan keterampilan.	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>
<b>31.</b>	Memfasilitasi korban penyalahgunaan NAPZA untuk mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang difasilitasi untuk mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>
<b>Analisis :</b> Pada seksi rehabilitasi sosial terdapat 7 kegiatan yang keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan, 4 diantaranya adalah kegiatan yang mendukung terlaksananya					

SPM. Kegiatan tersebut adalah Memberikan/memfasilitasi pelatihan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, Memberikan/memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks trauma, Mendistribusikan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas dan Mendistribusikan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar.					
<b>Seksi Jaminan Sosial Keluarga</b>					
<b>32.</b>	Memberikan Pelatihan dan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE untuk KPM Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah KPM PKH yang mandiri setelah mendapat Pelatihan dan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>
<b>33.</b>	Pembinaan Petugas Pendamping PKH yang berpotensi dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah petugas pendamping PKH yang terampil dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>
<b>Analisis :</b> Tabel diatas menunjukkan realisasi dari kegiatan pelatihan dan bantuan stimulant Usaha ekonomi Produktif dengan sasaran KPM PKH telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 40 KPM. Kegiatan ini sebagai salah satu pendukung sasaran RPJMD.					
<b>Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana</b>					
<b>34.</b>	Menyiapkan dan mendistribusikan bantuan tanggap darurat/logistic bagi korban bencana alam dan bencana sosial	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang telah diberi bantuan logistik	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100 %</b>
<b>35.</b>	Memfasilitasi pembinaan TAGANA	Jumlah TAGANA yang terampil dalam penanggulangan bencana	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>

36.	Melaksanakan pelayanan orang terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan orang dengan gangguan jiwa melalui rumah perlindungan sosial	Jumlah orang terlantar, ABH dan orang dengan gangguan jiwa yang mandiri setelah mendapat pelayanan di rumah perlindungan sosial	40	40	100%
37.	Memfasilitasi pemulangan Eks Narapidana	Jumlah Eks Narapidana yang difasilitasi pemulangannya	40	40	100%
36.	Memfasilitasi Bantuan Sosial tidak terencana bagi korban bencana alam dan bencana sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mandiri setelah mendapat bantuan sosial tidak terencana	70	70	100%
<b>Analisis :</b> bantuan sosial bagi warga terdampak bencana pada tahun 2020 telah sesuai dengan gtarget yang ditetapkan yaitu sebanyak 70 kejadian. Kegiatan ini merupakan salah satu indikator pada SPM.					
<b>Subbag Umum dan Kepegawaian</b>					
37.	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah Aset yang tercatat	315	315	100%
38.	Menyusun Data Kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Pelayanan Surat Menyurat	2000	2000	100%
39.		Jumlah Dokumen Terkait sarana dan prasarana	315	315	100%
		Jumlah SDM yang di fasilitas	43	43	100%

40.	Melaksanakan peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib	28	28	100%
<b>Subbag Perencanaan dan Keuangan</b>					
41.	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	4	4	
		Jumlah Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan	2	2	100%
42.	Menyusun Dokumen Keuangan Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara Berkala	2	2	100%

#### B. Capaian Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 secara umum selaras dengan Renja Dinas Sosial tahun 2020.

Keberhasilan masing-masing kegiatan strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dan keterkaitannya dengan keberhasilan program serta pencapaian sasaran dapat diikhtisarkan dapat dicapai dengan pelaksanaan **26 kegiatan** yang terangkum dalam **11 program**.

### 3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pengukuran tingkat pencapaian kinerja sasaran didasarkan pada hasil analisis indikator yang telah ditentukan di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan analisis pencapaian kinerja kegiatan merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh pada pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam analisis capaian kinerja ini, mengevaluasi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam program kegiatan yang dilaksanakan serta solusi yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan datang.

### Evaluasi dan Analisis Capaian Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV

**Tabel 3.4**  
**Capaian Perjanjian Kinerja Eselon II**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Menurunnya angka PMKS	10 %	- 29,37 %	$\frac{\text{Jumlah PMKS tahun (n-1)} - \text{Jumlah PMKS Tahun (n)}}{\text{Jumlah PMKS tahun (n)}} \times 100\%$ $= \frac{31.847 - 45.090}{45.090} \times 100 \%$ $= -29,37 \%$

### Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Keterangan
2	Meningkatnya kemampuan Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Meningkatnya kemampuan Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	50%	100%	<p>Jumlah keluarga fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibanding dengan populasi Fakir miskin Kab. Tanah Laut tahun 2020.</p> $29.124 : 29.124 \times 100 \%$ $= 100\%$ <p><b>Bidang pemberdayaan</b></p>

					<b>Sosial dan penanganan fakir miskin</b>
3	Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	75%	100%	<p>Jumlah PSKS yang meningkat perannya dalam penyelenggaraan kesos dibanding dengan Populasi PSKS.</p> <p><math>273 : 273 \times 100 \% = 100\%</math></p> <p><b>Bidang pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin.</b></p>
4	Meningkatnya peran dunia usaha melalui forum CSR dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatnya peran dunia usaha melalui forum CSR dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	25 %	0%	<p>TIDAK ADA DATA</p> <p><b>Bidang pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin.</b></p>
5	Meningkatnya kualitas informasi data PMKS dan Basis Data Terpadu (BDT)	Meningkatnya kualitas informasi data PMKS dan Basis Data Terpadu (BDT)	75%		<p>Jumlah data yang mampu diakses dibanding jumlah data secara keseluruhan</p> <p><b>Bidang pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin.</b></p>



6	Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial	Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial	15%	6.98%	Jumlah PMKS yang terampil dan mandiri dibanding Jumlah PMKS keseluruhan tahun 2020  <b>Bidang Rehabilitasi dan perlindungan Jaminan Sosial</b>
7	Meningkatnya Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Meningkatnya Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	25%	16,94%	Jumlah KPM PKH yang mandiri dibanding jumlah KPM keseluruhan  $1147 : 6769 \times 100 \% = 16,94 \%$ <b>Bidang Rehabilitasi dan perlindungan Jaminan Sosial</b>

#### Analisis Capaian Kinerja Esselon III :

1. Berdasarkan tabel di atas dapat di uraikan bahwa capaian target kinerja dengan sasaran meningkatnya kualitas hidup fakir miskin telah mencapai target yang telah di tetapkan yaitu mencapai **100%**. Ketercapaian ini banyak ditunjang dengan program dan kegiatan dari dana APBN, yaitu Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi Fakir Miskin dan Program Rehabilitasi Program Rumah Tidak Layak Huni. Peningkatan kualitas hidup keluarga fakir miskin belum menunjukkan keluarga fakir miskin tersebut keluar dari garis kemiskinan, karena indikator yang digunakan baru terbatas pada terpenuhinya kebutuhan dasar dalam hal ini adalah pangan.
2. Untuk menangani permasalahan sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, tentu saja melibatkan partisipasi sosial masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penanganan Kesejahteraan Sosial disebut PSKS. Tingkat partisipasi sosial masyarakat belum mencapai target yang di tetapkan dari 100 % target yang ditetapkan. Hal ini di karenakan keterbatasan anggaran dalam rangka

memberikan pendidikan dan pelatihan bagi PSM, TKSK, TAGANA dan relawan lainnya masih belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

3. Basis Data Terpadu (BDT) dan Data PMKS, merupakan penunjang utama dalam pelaksanaan program-program Dinas Sosial. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu dan PMKS telah dilaksanakan dan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini didukung dengan anggaran yang memadai dan partisipasi semua pihak mulai dari kecamatan serta operator data di setiap desa/kelurahan.
4. Capaian kinerja program jaminan sosial telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 25% yang ditargetkan dengan realisasi mencapai 16,94%.

Sasaran program jaminan sosial keluarga adalah program keluarga harapan (PKH) dengan anggaran dari APBN melalui Kementerian Sosial. Jumlah peserta PKH pada tahun 2020 mencapai 6.454 KPM sudah meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar baik pangan, pendidikan dan kesehatan.

#### Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Keterangan
8	Memberikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin	Jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	548	548	<b>Seksi pendampingan bantuan stimulant dan penataan lingkungan</b>
9	Memfasilitasi bantuan sosial rumah tidak layak huni	Jumlah rumah Keluarga Fakir Miskin yang direhab	100	100	<b>Belum Terprogram</b>  <b>Seksi pendampingan bantuan stimulant dan penataan lingkungan</b>
10	Memfasilitasi bantuan stimulan dan	Jumlah keluarga fakir miskin yang			Jumlah penerima bantuan stimulan

	pendampingan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) KUBE bagi keluarga fakir miskin Pedesaan, Perkotaan dan daerah pesisir	mandiri setelah diberikan bantuan stimulan UEP KUBE			UEP KUBE yang mandiri dibagi jumlah seluruh penerima bantuan UEP KUBE  <b>Seksi pendampingan bantuan stimulant dan penataan lingkungan</b>
11	Melaksanakan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Persentase keluarga fakir miskin yang melaksanakan usaha mandiri setelah mengikuti pelatihan			Jumlah keluarga miskin yang melaksanakan usaha mandiri dibanding jumlah seluruh fakmis di kab. Tanah laut  $1350 : 13.737 =$ <b>Seksi pemberdayaan masyarakat kelmbagaan dan restorasi sosial</b>
12	Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSM Yang Terampil	49	49	Jumlah PSM yang terampil di Kab. Tanah Laut  <b>Seksi pemberdayaan masyarakat kelmbagaan dan restorasi sosial</b>
		Jumlah TKSK yang Terampil	11	11	Jumlah TKSK yang terampil di Kab. Tanah Laut  <b>Seksi pemberdayaan masyarakat</b>

					<b>kelmbagaan dan restorasi sosial</b>
11		Jumlah Pendamping Sosial yang terampil	30	30	Jumlah Pendamping Sosial yang terampil di Kab. Tanah Laut  <b>Seksi pemberdayaan masyarakat kelmbagaan dan restorasi sosial</b>
12		Jumlah Pengurus orsos dan Karang Tauna yang terampil	110	110	Jumlah pengurus orsos dan Karang Taruna yang terampil  <b>Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas</b>
	Fasilitasi penanaman pelestarian nilai nilai kepahlawanan dan kesetiakawananan sosial	Jumlah peserta saresehan tentang pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	800	0	Jumlah peserta sarasehan
13	Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Forum CSR	Jumlah dunia usaha yang tergabung dalam Forum CSR yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	0	0	Tidak tersedia anggaran
14	Melaksanakan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT)	Jumlah data fakir miskin dan data orang tidak mampu yang	30.000	29.124	Jumlah Fakir miskin dan orang tidak mampu yang berhasil diverifikasi dan di

		diverifikasi dan divalidasi			validasi di banding jumlah data awal fakmis dan org tidak mampu.  <b>Seksi identifikasi dan Penguatan kapasitas</b>
15	Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bagi petugas pendata dan operator data tingkat desa dan kecamatan	jumlah operator data di desa dan di kecamatan yang terlatih dalam mengelola sistem informasi data	135	135	Jumlah oeprator data di desa dan kecamatan yang dilatih dibanding jumlah seluruh operator data didesa dan di kecamatan.  <b>Seksi identifikasi dan Penguatan kapasitas</b>
16	Melaksanakan pendataan PMKS	Jumlah PMKS yang di data dan di validasi	10000	16.414	Jumlah PMKS yang didata dan di validasi  <b>Seksi identifikasi dan Penguatan kapasitas</b>
17	Melaksanakan updating data secara berkala	jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan updating data	135	135	jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan updating data  <b>Seksi identifikasi dan Penguatan kapasitas</b>
18	Melaksanakan evaluasi pemanfaatan data	Jumlah pemanfatan BDT	10		Jumlah data yang digunakan

		oleh Instansi terkait			oleh instansi terkait dibanding jumlah data pada BDT  <b>Seksi identifikasi dan Penguatan kapasitas</b>
18	Memberikan/memfasilitasi pelatihan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.	Jumlah anak terlantar yang mendapat pendidikan dan pelatihan	30	30	Jumlah anak terlantar yang mendapat pendidikan dan pelatihan  <b>Seksi Rehabilitasi Sosial</b>
19	Memberikan/memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks trauma	Jumlah Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat pendidikan dan pelatihan kerja	20	20	Jumlah Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat pendidikan dan pelatihan kerja  <b>Seksi Rehabilitasi Sosial</b>
20	Mendistribusikan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	92	92	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya  <b>Seksi Rehabilitasi Sosial</b>
21	Mendistribusikan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	594	594	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

					<b>Seksi Rehabilitasi Sosial</b>
22	Melaksanakan Pendampingan bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Balita terlantar	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Anak Balita Terlantar yang terlindungi haknya setelah mendapat pendampingan sosial	35	35	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Anak Balita Terlantar yang terlindungi haknya setelah mendapat pendampingan sosial  <b>Seksi Rehabilitasi Sosial</b>
23	Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Eks Penyandang penyakit sosial	Jumlah Penyandang penyakit sosial yang terampil setelah mengikuti pelatihan keterampilan.	20	20	Jumlah Penyandang penyakit sosial yang terampil setelah mengikuti pelatihan keterampilan.  <b>Seksi Rehabilitasi Sosial</b>
	Memfasilitasi korban penyalahgunaan NAPZA untuk mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang difasilitasi untuk mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	<b>20</b>	20	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang difasilitasi untuk mendapat pelayanan rehabilitasi sosial  <b>Seksi Rehabilitasi Sosial</b>
	Memberikan Pelatihan dan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE untuk KPM	Jumlah KPM PKH yang mandiri setelah mendapat Pelatihan dan		1147	Jumlah KPM PKH yang mandiri setelah mendapat Pelatihan dan

	Program Keluarga Harapan (PKH)	Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)			Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)  <b>Seksi jaminan sosial keluarga</b>
	Pembinaan Petugas Pendamping PKH yang berpotensi dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah petugas pendamping PKH yang terampil dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	<b>42</b>	42	Jumlah petugas pendamping PKH yang terampil dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)
	Menyiapkan dan mendistribusikan bantuan tanggap darurat/logistic bagi korban bencana alam dan bencana sosial	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang telah diberi bantuan logistik	<b>70</b>	70	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang telah diberi bantuan logistik  <b>Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana</b>
	Memfasilitasi pembinaan TAGANA	Jumlah TAGANA yang terampil dalam penanggulangan bencana	<b>49</b>	49	Jumlah TAGANA yang terampil dalam penanggulangan bencana  <b>Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana</b>
	Melaksanakan pelayanan orang terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan orang dengan gangguan jiwa	Jumlah orang terlantar, ABH dan orang dengan gangguan jiwa yang mandiri setelah mendapat	<b>40</b>	40	Jumlah orang terlantar, ABH dan orang dengan gangguan jiwa yang mandiri setelah



	melalui rumah perlindungan sosial	pelayanan di rumah perlindungan sosial			mendapat pelayanan di rumah perlindungan sosial  <b>Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana</b>
	Memfasilitasi pemulangan Eks Narapidana	Jumlah Eks Narapidana yang difasilitasi pemulangannya	<b>40</b>	<b>40</b>	Jumlah Eks Narapidana yang difasilitasi pemulangannya  <b>Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana</b>
	Memfasilitasi Bantuan Sosial tidak terencana bagi korban bencana alam dan bencana sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mandiri setelah mendapat bantuan sosial tidak terencana	<b>70</b>	70	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mandiri setelah mendapat bantuan sosial tidak terencana  <b>Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana</b>
	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah Aset yang tercatat	<b>315</b>	<b>315</b>	Jumlah Aset yang tercatat <b>Sub Bag Umum Kepegawaian</b>
	Menyusun Data Kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Pelayanan Surat Menyurat	<b>2000</b>		Jumlah Dokumen Pelayanan Surat Menyurat  <b>Sub Bag Umum Kepegawaian</b>

		Jumlah Dokumen Terkait sarana dan prasarana	<b>315</b>	315	Jumlah Dokumen Terkait sarana dan prasarana  <b>Sub Bag Umum Kepegawaian</b>
		Jumlah SDM yang di fasilitasi	<b>43</b>	<b>43</b>	Jumlah SDM yang di fasilitasi  <b>Sub Bag Umum Kepegawaian</b>
	Melaksanakan peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib	<b>28</b>	<b>28</b>	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib  <b>Sub Bag Umum Kepegawaian</b>
	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Sosial	Nilai Komponen Perencanaan dan Pelaporan pada LAKIP Dinas Sosial	<b>1</b>	<b>BB</b>	Nilai Komponen Perencanaan dan Pelaporan pada LAKIP Dinas Sosial  <b>Sub Bag Perencanaan dan Keuangan</b>
	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	<b>2</b>	<b>2</b>	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara Berkala <b>Sub Bag Perencanaan dan Keuangan</b>

		Jumlah Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan	2	2	Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan Dibanding jumlah seluruh laporan keuangan yang diminta sesuai ketentuan
--	--	---	---	---	---

#### **Analisis Capaian Kinerja Esselon IV :**

Berdasarkan tabel capaian kinerja eselon IV di atas dapat di uraikan bahwa terdapat beberapa program yang capaian kinerjanya sesuai dengan target yang ditetapkan. Program-program tersebut lebih banyak memfasilitasi program dan kegiatan yang menggunakan dana APBN, seperti mendistribusikan bantuan sosial, mendistribusikan bantuan stimulant UEP KUBE dan memfasilitasi pendistribusian bantuan bagi pserta PKH.

### **3.4. REALISASI ANGGARAN**

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melihat pembiayaan selama tahun 2020 dapat di uraikan sebagai berikut :

Realisasi keuangan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Realisasi tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Presentase
1	Belanja tidak Langsung			

	1.Belanja Pegawai	4.490.540.946,00	2.915.580.233,00	64,92%
2	Belanja Langsung	2.561.862.272,00	2.661.272.562,00	105,6%
	1.Belanja Barang dan Jasa			
	2.Belanja Modal	193.600.000,00	202.650.000,00	104,7%

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

**a. Belanja Tidak Langsung**

**Belanja Pegawai** : Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada Pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan serta penghasilan lainnya, honorarium/upah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anggaran dan Realisasi belanja pegawai untuk Tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Per 31 Desember 2020 Rp.	Per 31 Desember 2019 Rp.
	3.162.935.779,00	2.951.580.233,00

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut sebesar 93,31%.

**b. Belanja Langsung**

Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2020 berdasarkan Program/kegiatan :

No	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN</b>	<b>864.215.272,00</b>	<b>729.891.390,00</b>	<b>84,45 %</b>

	<b>ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			
1	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan Koordinasi	280.707.400,00	197.755.000,00	70,44 %
2	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	213.060.000,00	165.251.158,00	77,56 %
3	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	370.447.872,00	366.885.232,00	99,03 %
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN, PENINGKATAN SARANA/PRASARANA KERJA DAN KUALITAS SEUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>202.192.000,00</b>	<b>153.242.140,00</b>	<b>75,79 %</b>
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	57.000.000,00	55.650.000,00	97,63 %
14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	145.195.000,00	97.592.140,00	67,21 %
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	0,00	0,00	0

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	0,00	0,00	0
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYEBARLUASA N INFORMASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN SKPD</b>	<b>19.965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Penyebarluasa Informasi Pembangunan Daerah	19.965.000,00	0,00	0
<b>IV</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>	<b>636.244.500,00</b>	<b>550.853.500,00</b>	<b>86,57 %</b>
	Verifikasi dan Validasi data terpadu	364.559.500,00	298.742.500,00	81,67 %
	Penunjang Program Rutilahu dan Sarling	1.620.000,00	1.515.000,00	93,51 %
	Pembinaan, Pendampingan	269.065.000,00	250.596.000,00	93,13 %

	bantuan stimulant dan penataan lingkungan			
<b>V</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>153.300.000,00</b>	<b>70.085.000,00</b>	<b>45,71 %</b>
	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	67.070.000,00	48.010.000,00	71,58 %
	Pembinaan korban tindak kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)	86.230.000,00	22.075.000,00	25,60 %
	<b>PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA</b>	<b>184.932.000,00</b>	<b>93.988.000,00</b>	<b>50,82 %</b>
	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat	71.090.000,00	52.034.000,00	73,19 %
	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	113.842.000,00	41.954.000,00	36,85 %
	<b>PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /</b>	<b>286.610.000,00</b>	<b>275.274.250,00</b>	<b>96,04 %</b>

	<b>JOMPO</b>			
	Pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar	286.610.000,00	275.274.250,00	<b>96,04 %</b>
	Pelayanan dan pelathan bagi penyandang cacat dan eks trauma	0,00	0,00	0
	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	0,00	0,00	0
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>466.421.500,00</b>	<b>246.259.900,00</b>	<b>52,79 %</b>
	Pembinaan, identifikasi dan penguatan kapasitas pemberdayaan sosial	153.507.000,00	23.535.000,00	15,33 %
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	127.433.200,00	72.042.500,00	56,53 %
	Pelestarian Nilai-Nilai kepahlawanan,	185.481.300,00	150.682.400,00	81,23 %



	keperintisan dan kesetiakawanan sosial			
	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>410.249.000,00</b>	275.397.000,00	67,12 %
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	211.865.000,00	89.594.000,00	42,28 %
	Penunjang Program Keluarga Harapan	198.384.000,00	185.803.000,00	93,65 %
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA SKPD</b>	<b>46.010.000,00</b>	33.887.300,00	73,65 %
	Penyusunan perencanaan dan Kinerja SKPD	7.670.000,00	7.517.800,00	98,01 %
	Penyusunan Laporan Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	100 %

	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	35.340.000,00	23.369.500,00	66,12 %
		3.270.142.272,0 0	2.428.878.480,0 0	

## **BAB 4 PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LAKIP ini.

### **4.2 SARAN**

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk memperoleh kualitas data dan analisa data yang lebih akurat serta melakukan konsultasi teknis dan asistensi kepada pihak yang berkompeten dalam penyusunan LAKIP;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, menetapkan target yang tepat, dan menyesuaikan indikator pada setiap program dan kegiatan sesuai ketentuan yang ada, sehingga dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan (aplikatif) serta dapat mengurangi kesalahan/ keraguan dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerja.
3. Menggunakan pemecahan solusi dalam dokumen ini sebagai strategi mempertahankan capaian kinerja pada pelaksanaan program/ kegiatan tahun selanjutnya;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan balik pencapaian target kinerja.